

**GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA DESA
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PENGALIAN
KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR
SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Oleh :

ELY WAHYUNI

NPM 1503100061

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

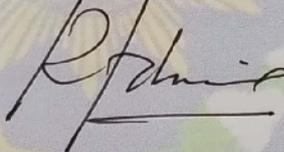
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : ELY WAHYUNI
NPM : 1503100061
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA DESA
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PENGGALIAN
KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR SERDANG
BEDAGAI

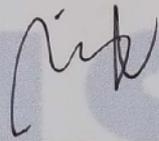
Medan, 14 Maret 2019

PEMBIMBING



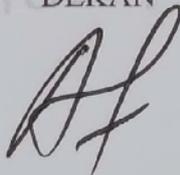
RAFDINAL, S.Sos, M.AP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

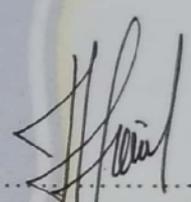
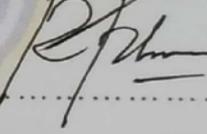
Nama : ELY WAHYUNI
NPM : 1503100061
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si

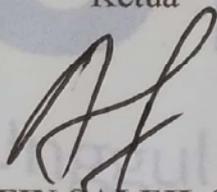
PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H

PENGUJI III : RAFDINAL, S.Sos, M.AP

()
()
()

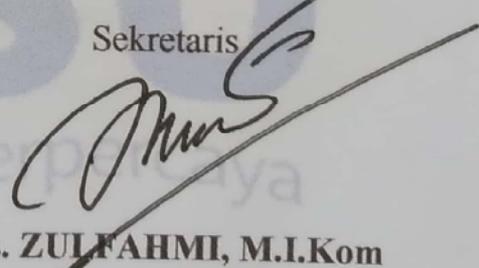
PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya Ely Wahyuni, NPM 1503100061 menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari ini terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 05 Maret 2019

Yang menyatakan



Ely Wahyuni



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Untuk menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ELY WAHYUNI
NPM : 1503100061
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Gaya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar serdang Bedagai

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	24-12-18	1. Pembantu / Suplemen latar belakang masalah. 2. Pembantu tata tulis dan susunan pedoman Penulisan Skripsi	
2	4-1-2019	1. Pembantu / Suplemen / Mengejut teori kepemimpinan Partisipatif 2. Pembantu konsep konsep / kategorisasi 3. Mengejut data Partaka kincir kincir Part	
3	23-1-2019	1. Suplemen latar belakang kincir data dan Penggalan kincir kincir kincir 2. Pembantu kincir kategorisasi 3. Pembantu kincir Narasumber	
4	24-1-2019	1. Pembantu dan Suplemen Partoman wawancara.	
5	25-1-2019	Partoman wawancara data di lapangan	
6	26-2-2019	Pembantu Bab III dan Bab IV dan Mengejut analisis dari kincir Narasumber yg di wawancara	
7	27-2-2019	Pembantu Simpulan dan saran. Serta abstrak	
8	1-3-2019	Pembantu Suplemen saran, Abstrak	
9	5-3-2019	Ace Skripsi kincir kincir Akhri	

Medan, 06 Maret 2019...

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP)

Ketua Program Studi,

(Nail Khairiah, S.IP, M.Pd)

Pembimbing ke :

(Rafidinal S.Sos, M.AP.)

ABSTRAK

GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PENGGALIAN KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR SERDANG BEDAGAI

ELY WAHYUNI
1503100061

Keberhasilan pembangunan di Desa Penggalian sangat tergantung pada gaya kepemimpinan Kepala Desa. Gaya kepemimpinan seorang Kepala Desa dapat menentukan kesuksesan, kinerja atau pelaksanaan tanggungjawab aparatur desa. Gaya kepemimpinan Partisipatif yang ditunjukkan oleh seorang Kepala Desa terbukti dapat merangsang partisipasi masyarakat untuk melaksanakan program pembangunan. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan yang menitikberatkan aspek persamaan kekuatan dan pemecahan masalah bersama dengan bawahan dengan cara melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum mengambil dan membuat keputusan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Penggalian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Penggalian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan penelitian ini berjumlah 6 orang.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepemimpinan Kepala Desa Penggalian sudah merupakan gaya kepemimpinan partisipatif. Kepala Desa dan masyarakat mengambil keputusan secara bersama-sama melalui musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pendelegasian wewenang yang diberikan Kepala Desa kepada bawahan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai tugas dan tanggungjawab serta kompetensi bawahan. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa sudah melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa menilai bawahan secara objektif. Kepala Desa memberikan *reward* kepada bawahan yang sudah melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan *punishment* kepada yang melanggar dari tugas dan tanggungjawab.

Kata kunci: Gaya Kepemimpinan Partisipatif, Kepala Desa, Pembangunan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Terlebih penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil'alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta ketekunan kepada penulis. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dari alam kebodohan menuju alam dengan ilmu pengetahuan. Berkat ridha dan karunia Allah SWT maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan yang berjudul "Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Penggalian Kecamatan Tebing Syahbandar Serdang Bedagai".

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir bagi penulis untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan jenjang Strata I sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lembaran ini sekaligus menjadi media bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, semangat dan dukungan yang cukup banyak baik itu secara moral maupun secara material. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Untuk almarhum Ayahanda, Ibunda, Kakak dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral maupun material.
2. Bapak Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip., M.Pd selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Rafdinal, S.Sos.,M.AP selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Dosen dan seluruh Staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Untuk Azhari Nasution, Topan Rasyid Matondang, Rahmat Taufik, Nurmala, Julita Dewi, Rini Anggi Safitri, Deli Mustika Devi, Maulida Ulfa, Suwito, Randi Permana, Hardiansyah Tanjung, Harun Al Rasyid, Syafii, Ari Sahputra, Rizki Fauzi, Yogi Ade, Muhammad Iqbal, dan Heri Ardiansyah terima kasih untuk hari-hari yang telah kita lalui bersama. Terima kasih untuk dukungan, saran dan masukan, semangat, doa, canda tawa, suka duka, terima kasih untuk kebersamaan yang pernah kita alami bersama.

8. Teman-teman seperjuangan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah bersama-sama mengikuti proses perkuliahan, semoga ilmunya berkah sehingga kita bisa bermanfaat buat agama, bangsa dan negara.
9. Teman-teman seperjuangan yang tergabung kedalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mendo'akan dan mendukung dengan memberikan motivasi moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa sekaligus hamba Allah yang harus terus menggali ilmu untuk diamankan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2019

Penulis

Ely Wahyuni

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Kepemimpinan	10
2.1.1 Pengertian Kepemimpinan.....	10
2.1.2 Tipe-Tipe Kepemimpinan	12
2.1.3 Fungsi Kepemimpinan.....	13
2.1.4 Ciri-ciri Pemimpin	15
2.2 Gaya Kepemimpinan Partisipatif.....	15
2.2.1 Pengertian Kepemimpinan Partisipatif	15
2.2.2 Manfaat Kepemimpinan Partisipatif.....	16

2.2.3 Ciri-ciri Kepemimpinan Partisipatif	17
2.3 Kepala Desa.....	18
2.3.1 Pengertian Kepala Desa	18
2.3.2 Syarat-Syarat menjadi Kepala Desa	18
2.3.3 Tugas dan Kedudukan Kepala Desa	20
2.3.4 Wewenang Kepala Desa	20
2.3.5 Kewajiban Kepala Desa	21
2.4 Pembangunan	22
2.4.1 Pengertian Pembangunan.....	22
2.4.2 Perencanaan Pembangunan	22
2.5 Pembangunan Infrastruktur Desa	25
2.5.1 Pengertian Pembangunan Infrastruktur Desa.....	25
2.5.2 Tujuan Pembangunan Desa.....	26
2.5.3 Manfaat Pembangunan Infrastruktur	26
2.5.4 Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur Desa	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Kerangka Konsep	28
3.3 Defenisi Konsep	29
3.4 Kategorisasi	30
3.5 Narasumber	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Analisis Data	32

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Kajian	32
3.9.1 Sejarah Desa.....	32
3.9.2 Kondisi Geografis.....	33
3.9.3 Demografi	34
3.9.4 Visi dan Misi	35
3.9.5 Struktur Organisasi	36
3.9.6 Tugas Pokok dan Fungsi.....	38
3.9.7 Perangkat Desa Penggalan	43
3.9.8 Sarana dan Prasarana Desa Penggalan	44
3.9.9 Program Pembangunan Infrastruktur.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	46
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	46
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara	47
4.2 Pembahasan	61

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kepala Desa Penggalan.....	33
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Penggalan	34
Tabel 3.3 Perangkat Desa Penggalan	43
Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana Desa Penggalan	44
Tabel 3.5 Program Pembangunan Infrastruktur	45
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	29
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Penggalian	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran IX	: Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu organisasi, unsur manusia menjadi salah satu sumber penentu bagi perubahan dan jalannya organisasi tersebut. Terkait dengan keberhasilan proses organisasi, maka unsur pemimpin memegang peranan yang sangat penting. Kepemimpinan (*leadership*) dalam suatu organisasi, lembaga atau institusi mempunyai peranan yang sangat penting, karena tanpa adanya kepemimpinan kumpulan orang dan sistem kerja yang ada didalamnya hanya akan merupakan suatu kumpulan yang tidak berarti. Dengan demikian tujuan organisasi yang telah direncanakan dengan matang tidak akan tercapai.

Kesuksesan atau kegagalan yang dialami sebagian besar organisasi ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang disertai tugasnya mampu atau tidak dalam memimpin organisasi tersebut. Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Dengan demikian kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil.

Di dalam Pemerintahan, desa adalah organisasi pemerintahan resmi yang terendah. Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang merupakan penyelenggara dan sekaligus penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan

didalam wilayahnya. Selanjutnya tugas dan fungsi kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa pada pasal 14 adalah:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintah.

Urusan pemerintah yang diselenggarakan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antar desa.

b. Menyelenggarakan urusan pembangunan.

Urusan pembangunan yang dimaksud antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, dan pasar desa.

c. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

Urusan kemasyarakatan yang dimaksud antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan. Mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam

struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan otonomi dan kewenangan penuh untuk mengelola secara langsung sumber daya manusia dan juga sumber anggaran serta menempatkan posisi yang sangat strategis dalam tatanan sistem pemerintahan. Salah satu bentuk dari pengelolaan sumber daya manusia di desa adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di desa melalui rembug desa. Rembug desa dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat yang akan membahas perencanaan pembangunan desa. Hasil dari rembug desa akan dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Rembug desa merupakan upaya dari pemberdayaan masyarakat desa karena masyarakat dituntun untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Rembug desa diharapkan mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk membangun desa.

Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi suatu daerah, karena pembangunan tersebut dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat secara signifikan. Pembangunan infrastruktur fisik merupakan hal yang sangat vital dalam konteks pembangunan suatu daerah, hal ini dikarenakan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau masyarakat disuatu daerah khususnya desa sangat bergantung pada akses yang dimiliki oleh wilayah atau desa tersebut guna mendukung segala aktivitas masyarakatnya. Beberapa infrastruktur yang dimaksud dapat mempengaruhi kualitas suatu masyarakat dan meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan suatu masyarakat adalah pembangunan jalan,

jembatan, puskesmas, prasarana pendidikan dan tempat-tempat ibadah yang merupakan infrastruktur dan mempercepat pembangunan guna meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam hal pembangunan infrastruktur di suatu desa peran serta kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa memegang peranan yang sangat vital, seorang kepala desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa agar terselenggaranya pembangunan desa dengan baik.

Gaya kepemimpinan seorang Kepala Desa dapat menentukan kesuksesan, kinerja atau pelaksanaan tanggungjawab aparatur desa. Pada umumnya kebanyakan tipe kepemimpinan yang diterapkan dalam sistem pemerintahan ditingkat desa adalah tipe kepemimpinan yang otoritatif, tipe kepemimpinan ini menitikberatkan gaya kepemimpinan yang instruktif dimana seorang pemimpin desa atau kepala desa melaksanakan kontrol pemerintahan secara kaku dengan menempatkan dirinya di posisi lebih tinggi dan cenderung otoriter kepada bawahan. Tipe kepemimpinan ini dirasakan kurang cocok untuk diterapkan di Negara Indonesia yang menitikberatkan aspek kekeluargaan dan musyawarah dalam struktur masyarakatnya. Maka untuk mengatasi hal tersebut dan memastikan kinerja dan tanggung jawab aparatur desa berjalan maksimal dibutuhkan tipe atau gaya kepemimpinan yang lain untuk menggantikan gaya kepemimpinan tersebut. Persoalan gaya kepemimpinan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif untuk dilaksanakan oleh aparatur desa, dalam hal ini yang dimaksud dengan apatur desa adalah Kepala Desa dan bawahannya.

Gaya kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan yang menitikberatkan aspek persamaan kekuatan dan pemecahan masalah bersama dengan bawahan dengan cara melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum mengambil dan membuat keputusan. Kepemimpinan partisipatif berkaitan erat dengan penggunaan berbagai macam prosedur pengambilan keputusan yang memberikan kepada orang lain suatu pengaruh tertentu terhadap keputusan-keputusan pemimpin tersebut. Istilah lain yang dapat mengacu kepada kepemimpinan partisipatif termasuk konsultasi, pembuatan keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan manajemen yang demokratis. Pada intinya kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan yang selalu melibatkan seluruh elemen organisasi dalam mengambil kebijakan organisasi atau pemerintahan desa. Dengan hal itu titik tekannya hanya kepada penggunaan partisipasi mereka, pemimpin hanya akan menjadi seseorang yang melegalkan apa yang menjadi keputusan semua pihak.

Gaya kepemimpinan Kepala Desa Penggalan masih jauh dari gaya kepemimpinan partisipatif. Kepala Desa masih kurang perhatian kepada pembangunan infrastruktur di Desa Penggalan. Kurangnya kerja sama kepala desa kepada masyarakat sehingga menyebabkan banyak pembangunan infrastruktur yang tidak dilaksanakan. Kepemimpinan seorang kepala desa menentukan arah pembangunan desa itu sendiri. Pembangunan yang ada pada suatu desa harus mengikutsertakan masyarakat dan aparat pemerintah lainnya. Pembangunan yang efektif dan efisien harus dapat mengakomodir kebutuhan

yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu Kepemimpinan kepala desa harus dapat mengikutsertakan aparatur pemerintah yang lain dan masyarakat.

Pembangunan yang ada di desa dititikberatkan pada pembangunan fisik, selain itu pembangunan desa juga melihat bagaimana pembangunan sumber daya manusia yang ada pada suatu desa tersebut. Pembangunan desa harus di dukung oleh berbagai aspek komponen yang ada di desa agar pembangunan yang ada di desa tersebut dapat berjalan optimal dan dirasakan oleh masyarakat yang luas.

Dalam kajian ini penulis mengupas tentang hal-hal yang menjadi permasalahan di dalam pedesaan khususnya Desa Penggalan. Pelaksanaan pembangunan yang terdapat pada tingkat dusun masih tertinggal. Tidak sesuai dengan peran dan fungsi dari desa yang mana banyak memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan kehidupan yang ada di perkotaan. Desa Penggalan memiliki 9 dusun dimana setiap dusun masih kurangnya pembangunan, baik pembangunan jalan, drainase, puskesmas. Adapun permasalahan yang dimiliki oleh Desa Penggalan, yaitu:

- a. Masih terdapatnya jalan-jalan antar dusun yang kondisinya sangat kurang memadai. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembangunan jalan yang baik antar dusun seperti semenisasi jalan.
- b. Tidak adanya Puskesmas terdekat untuk masyarakat Desa sehingga banyak masyarakat yang berobat ke Puskesmas pusat yang jarak tempuhnya cukup jauh. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mau untuk berobat ke Puskesmas karena jaraknya yang cukup jauh.

- c. Masih kurangnya drainase di setiap dusun sehingga membuat masyarakat kesulitan untuk membuang limbah rumah tangga.
- d. Kurangnya lampu jalan di setiap dusun

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Serdang Bedagai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Penggalan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimana Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Penggalan”.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui Pembangunan Infrastruktur Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kepemimpinan, pengertian kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, fungsi kepemimpinan,

ciri-ciri pemimpin, gaya kepemimpinan partisipatif, pengertian kepemimpinan partisipatif, manfaat kepemimpinan partisipatif, ciri-ciri kepemimpinan partisipatif, kepala desa, pengertian kepala desa, syarat-syarat menjadi kepala desa, tugas dan kedudukan kepala desa, kewajiban kepala desa, pembangunan, pengertian pembangunan, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur desa, pengertian pembangunan infrastruktur desa, tujuan pembangunan desa, manfaat pembangunan infrastruktur, ruang lingkup pembangunan infrastruktur.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang penyajian data dan analisis data dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang simpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kepemimpinan

2.1.1 Pengertian Kepemimpinan

Kaswan (Wood, 2000:314) mengemukakan kepemimpinan yaitu pengaruh interpersonal yang menyebabkan sekelompok orang melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin atau manajer untuk dilakukan. Wibowo (Greenberg dan Baron, 2003:471) memberikan definisi kepemimpinan sebagai proses di mana satu individu memengaruhi anggota kelompok lain menuju pencapaian tujuan kelompok atau organisasional yang didefinisikan.

Menurut Veithzal, dkk (2014:3), kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk memengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi, sehingga dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Definisi kepemimpinan menurut Veithzal, dkk (2014:3) yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu :

- a. Wexley dan Yuki (1997), kepemimpinan mengandung arti memengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga, dalam tugasnya atau mengubah tingkah laku mereka.

- b. Georger R. Terry (1983), kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama.
- c. Robbins (2001), kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian, pengertian mengenai kepemimpinan diatas yang dikemukakan menurut sudut pandang masing-masing, tergantung pada perspektif yang digunakan. Dari pengertian diatas kepemimpinan mengandung unsur pokok antara lain :

- a. Kepemimpinan melibatkan orang lain dan adanya situasi kelompok atau organisasi tempat pemimpin dan anggotanya berinteraksi.
- b. Didalam kepemimpinan terjadi pembagian kekuasaan dan proses memengaruhi bawahan oleh pemimpin.
- c. Adanya tujuan bersama yang harus dicapai.

Sedarmayanti (2014:73) mengemukakan tantangan kepemimpinan adalah mendorong komitmen diantara orang-orang dalam suatu organisasi serta para pemangku kepentingan (stakeholder) di luar organisasi untuk menerima perubahan dan melaksanakan strategis yang ditujukan untuk memosisikan organisasi agar tetap sukses pada masa depan yang sangat berbeda.

2.1.2 Tipe-Tipe Kepemimpinan

Menurut Veithzal dan Deddy (2012:36-37), ada tiga tipe kepemimpinan yaitu:

a. Tipe kepemimpinan otoriter

Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Pimpinan memandang dirinya lebih dalam segala hal, dibandingkan dengan bawahannya.

b. Tipe kepemimpinan kendali bebas

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan diajalkan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasihat.

c. Tipe kepemimpinan demokratis

Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok/organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspek seperti dirinya juga. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah.

2.1.3 Fungsi Kepemimpinan

Menurut Sondang (2010:47-48), fungsi kepemimpinan yaitu:

- a. Pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha mencapai tujuan.
- b. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi.
- c. Pimpinan selaku komunikator yang efektif.
- d. Mediator yang andal, khususnya dalam hubungan ke dalam terutama dalam menangani situasi konflik.
- e. Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral.

Menurut Veithzal dan Deddy (2012:34-35), fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi. Secara operasional dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu :

- a. Fungsi intruksi

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

b. Fungsi konsultasi

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pemimpin pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan.

c. Fungsi partisipasi

Fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.

d. Fungsi delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan.

e. Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa pemimpin yang sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam

koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

2.1.4 Ciri-ciri Pemimpin

Untuk mewujudkan seseorang menjadi pemimpin yang ideal dibutuhkan syarat-syarat yang tergambar dalam bentuk ciri-ciri yang dimiliki. Irham Fahmi (2018:8-9) mengatakan adapun ciri-ciri untuk menjadi seorang pemimpin sebagai berikut :

- a. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Artinya, kompetensi yang dimilikinya sangat berguna untuk diterapkan pada saat itu, dan kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak.
- b. Memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut.
- c. Mampu menerapkan konsep "*the right man and the right place*", artinya menempatkan orang sesuai dengan tempatnya dan kemampuan kompetensi yang dimilikinya

2.2 Gaya Kepemimpinan Partisipatif

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan Partisipatif

Gary Yukl (2017:100) mengatakan bahwa kepemimpinan partisipatif menyangkut penggunaan berbagai macam prosedur keputusan yang memberi orang lain pengaruh tertentu terhadap keputusan pemimpin tersebut istilah lainnya yang biasa digunakan untuk menuju ke aspek kepemimpinan partisipatif

mencakup konsultasi, pengambilan keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi, pemberdayaan, dan manajemen yang demokratis.

Menurut Hessel (2005:205) kepemimpinan partisipatif yaitu pemimpin meminta dan menggunakan saran-saran bawahan, tetapi tetap berperan dalam pengambilan dan pembuatan keputusan. Toman (Davis dan Newstrom, 2015:50) mengatakan bahwa pemimpin partisipatif yaitu pemimpin yang mendesentralisasi wewenang. Kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan yang berusaha untuk melibatkan, mengikutsertakan, memberdayakan semua anggota organisasi di dalam mendukung peran dan tanggung jawab seorang pemimpin.

2.2.2 Manfaat Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan partisipatif melibatkan aspek-aspek yang sering disebut sebagai pengambilan keputusan bersama, konsultasi, pembagian kekuasaan, desentralisasi, dan manajemen demokratis. Danang dan Burhanudin (2015:94-95), mengatakan kepemimpinan partisipatif memiliki banyak manfaat. Adapun manfaat kepemimpinan partisipatif antara lain:

- a. Kualitas keputusan tinggi. Melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan akan lebih meningkatkan kualitas keputusan dari pada dilakukan sendiri.
- b. Penerimaan keputusan tinggi. Keputusan yang dibuat bersama dengan melibatkan partisipasi orang lain, membuat orang-orang yang terlibat dengan keputusan tersebut merasa bahwa itu adalah keputusan mereka.

- c. Kepuasan. Orang yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan merasa dihargai dan dihormati yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja mereka.
- d. Pengembangan keterampilan partisipan. Orang-orang yang terlibat dengan banyak aspek dalam proses pengambilan keputusan akan belajar lebih banyak dari pada orang-orang yang terlibat hanya pada satu atau beberapa aspek saja.

2.2.3 Ciri-ciri Kepemimpinan Partisipatif

Raja Bambang (2007:24) mengemukakan ciri-ciri kepemimpinan partisipatif:

- a. Setiap keputusan diambil melalui diskusi bersama pihak-pihak yang terkait.
- b. Dalam menyelesaikan tugas-tugas, karyawan diberi wewenang, hak, dan tanggung jawab secukupnya untuk menerapkan caranya sendiri yang dianggap efisien.
- c. Menilai bawahan secara rasional, dengan melihat data dan fakta.
- d. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengajukan pendapat sejauh hal itu sejalan dengan tujuan organisasi.
- e. Tidak kaku dalam mengawasi pekerjaan bawahan.

2.3 Kepala Desa

2.3.1 Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa. Kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa yang dapat dilihat dari gaya kepemimpinan kepala desa tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26-30 dikatakan bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan perwakilan desa. Pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Peraturan Pemerintah tersebut dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.

2.3.2 Syarat-Syarat menjadi Kepala Desa

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kepala desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 33 Tentang Desa yaitu :

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sertabukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

2.3.3 Tugas dan Kedudukan Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut kedudukannya kepala desa adalah sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa.

2.3.4 Wewenang Kepala Desa

Wewenang kepala desa yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

2.3.5 Kewajiban Kepala Desa

Menurut pasal 26 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan Kepala Desa berkewajiban antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; dan seterusnya.
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.

2.4 Pembangunan

2.4.1 Pengertian Pembangunan

Nurman (Siagian, 1994) memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, budaya (Alexander, 1994). Nurman (Tikson, 2005) menyebutkan bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

2.4.2 Perencanaan Pembangunan

Nurman (Sirojuzilam dan Mahali, 2010) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud tujuan memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas, mengubah dan memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Nurman (Randy R dan Rian, 2006) mengemukakan bahwa faktor yang menentukan perencanaan pembangunan diantaranya adalah :

- a. Pemahaman tentang teori perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan konsep-konsep ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi.
- b. Pemahaman tentang cakupan wilayah perencanaan yaitu perencanaan nasional, perencanaan regional, perencanaan daerah atau perencanaan kawasan.
- c. Pemahaman tentang bentuk rencana pembangunan, yaitu pembangunan, program, proyek atau crash program.
- d. Pemahaman tentang sumber/bentuk pembiayaan perencanaan, yaitu bersumber dari negara-pusat, bersumber dari negara-daerah, bersumber dari swasta.
- e. Pemahaman tentang alur perencanaan : *top-down, bottom-up, sinergi top-down dan bottom up*.

Nurman (Munir, 2002) mengatakan berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi :

- a. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
- b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diroyeksikan dengan jelas.

- c. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Hanif (2011:107) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan desa terdiri atas :

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa)

RPJMDesa adalah suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

- b. Rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa)

RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta pemikiran maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. RPJMD Desa ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP-Desa dan ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan berpedoman pada peraturan daerah.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus di dasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa
- c. Keuangan desa
- d. Profil desa
- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat

2.5 Pembangunan Infrastruktur Desa

2.5.1 Pengertian Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut Effendi (2002:48), pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi yang bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya didaerah, karena apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

2.5.2 Tujuan Pembangunan Desa

Nurman (Djiwandono, 1981) menjelaskan tujuan pembangunan desa yaitu:

- a. Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b. Tujuan sosial, ke arah pemerataan kesejahteraan penduduk desa, dan budaya dalam arti peningkatan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- c. Tujuan demografis, ke arah meningkatkan potensi sumber daya alam, dan tingkat kepadatan penduduk per-kapita.
- d. Tujuan politis, dalam arti menumbuh dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

2.5.3 Manfaat Pembangunan Infrastruktur

Manfaat pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan infrastruktur yang memadai adanya kecenderungan penyelenggaraan pemerintah di daerah akan lebih aman dan lancar, bahkan keefektifan pembangunan daerah akan dapat terwujud. Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada visi dan misi daerah hendaknya di selenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien serta tepat sasaran sehingga hasil yang di capai dapat di nikmati oleh semua komponen masyarakat.

2.5.4 Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur desa

Ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu.
- b. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan.
- c. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

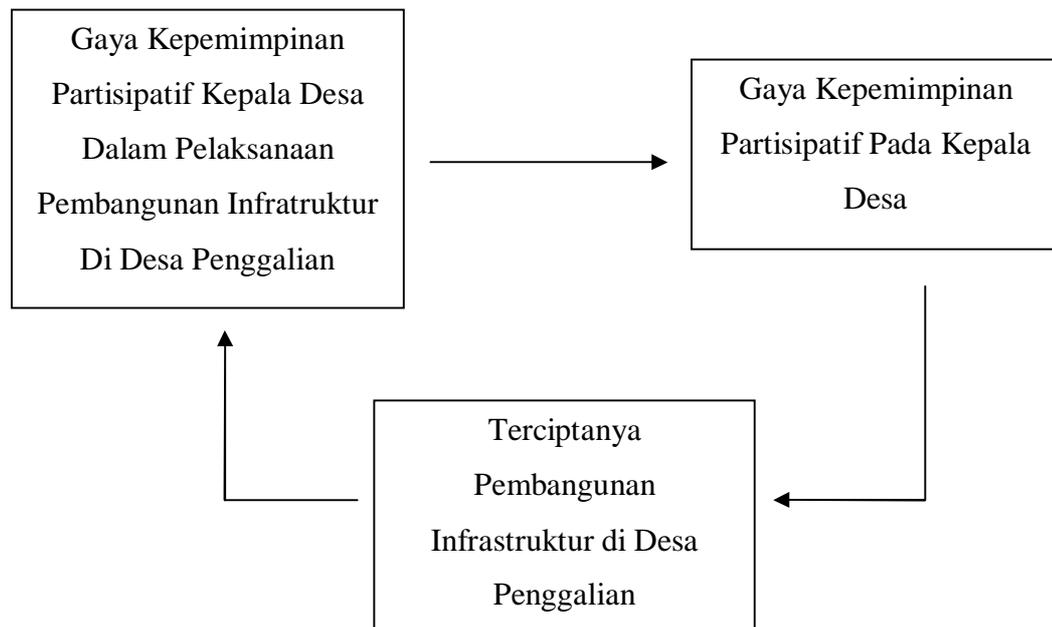
3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan metode penelitian kualitatif relatif dapat menganalisa realitas social secara mendalam. Menurut Sugiyono (2014:15) data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Pendekatan deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan gaya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Penggalian.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan partisipatif kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka kerangka konsep yang digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis seperti apa yang digambarkan dalam bagan pada halaman berikut ini.



Gambar 3.1
Kerangka Konsep Penelitian

3.3 Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak; kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu. Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kepemimpinan adalah sebagai proses di mana satu individu memengaruhi anggota kelompok lain menuju pencapaian tujuan kelompok atau organisasional yang didefinisikan.
- b. Kepemimpinan partisipatif yaitu pemimpin meminta dan menggunakan saran-saran bawahan, tetapi tetap berperan dalam pengambilan dan pembuatan keputusan.

- c. Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa.
- d. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
- e. Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya pengambilan keputusan bersama dalam pengambilan keputusan.
- b. Adanya pendelegasian wewenang kepada bawahan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
- c. Adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- d. Adanya penilaian secara objektif kepada bawahan.
- e. Adanya *reward* atau *punishment* yang diberikan kepala desa kepada bawahan.

3.5 Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yaitu :

a. Kepala Desa di Desa Penggalian

1. Nama : Syaiful Amri
2. Umur : 54 Tahun
3. Jabatan : Kepala Desa Penggalian
4. Alamat : Dusun VI, Desa Penggalian
5. Pendidikan Terakhir : SMA

b. Sekretaris Desa di Desa Penggalian

1. Nama : Syahman Harsela Damanik
2. Umur : 42 Tahun
3. Jabatan : Sekretaris Desa Penggalian
4. Alamat : Dusun VI, Desa Penggalian
5. Pendidikan Terakhir : SMA

c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Penggalian

1. Nama : Nurjanni Syahfitri Saragih
2. Umur : 36 Tahun
3. Jabatan : Ketua BPD Desa Penggalian
4. Alamat : Dusun I, Desa Penggalian
5. Pendidikan Terakhir : SMA

d. Kepala Dusun di Desa Penggalian

1. Nama : Gunawan
2. Umur : 41 Tahun
3. Jabatan : Kepala Dusun I Desa Penggalian
4. Alamat : Dusun I, Desa Penggalian
5. Pendidikan Terakhir : SMA

e. Tokoh Anggota Kelompok Tani di Desa Penggalian

1. Nama : Robinson Harahap
2. Umur : 45 Tahun
3. Jabatan : Anggota Kelompok Tani Desa Penggalian
4. Alamat : Dusun II, Desa Penggalian
5. Pendidikan Terakhir : SMP

f. Tokoh Agama di Desa Penggalian

1. Nama Narasumber : Ahmad Sahri
2. Umur : 59 Tahun
3. Jabatan : Tokoh Agama Desa Penggalian
4. Alamat : Dusun I, Desa Penggalian
5. Pendidikan Terakhir : SD

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang berguna untuk penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

3.6.1 Data Primer

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan data yang diteliti. Data primer diperoleh dengan wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab. Sugiyono (2014:157) mengemukakan bahwa wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.

3.6.2 Data Sekunder

Yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi serta naskah lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan dalam penelitian, menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari narasumber. Metode penelitian dengan pendekatan tipe deskriptif akan menggambarkan situasi berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan.

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Penggalian Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dan waktu penelitian dari bulan Januari hingga Maret 2019.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Desa

Menurut sejarah asal kata Penggalian adalah di ambil dari Penggalian Emas, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut bangsa Jepang Desa Ini terdapat tempat-tempat penyimpanan emas yang tidak tau dimana posisi yang pasti. Bagi Masyarakat setempat yang awal mula dihuni oleh suku batak Simalungun di tabalkanlah nama tersebut menjadi Desa Penggalian. Masyarakat menganggap Penggalian yang berulang-ulang memiliki nilai historis pada saat itu dan merupakan ciri khas dari kampung ini. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 silih berganti desa Penggalian dipimpin oleh Kepala Kampung dan Kepala Desa. Adapun nama-nama raja/pangulu/Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Penggalian.

Tabel 3.1
Kepala Desa Penggalian

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1930 s/d 1941	Penghulu Tamat Saragih	Kepala Kampung
2	1941 s/d 1949	Tuan Graung dan Tuan Jahamti	Kepala Kampung
3	1949 s/d 1952	Usup Sinaga	Kepala Kampung
4	1952 s/d 1963	Abdurrahman Damanik	Kepala Kampung
5	1963 s/d 1964	Ambang Saragih	Createkar

6	1964 s/d 1992	Ahmadsyah Saragih	Kepala Desa
7	1992 s/d 1994	Railam Damanik	PJS
8	1994 S/D 2008	Ridwan Damanik	Kepala Desa
9	2008 s/d 2014	Rosminto, Sp	Kepala Desa
10	2014 s/d 2016	Samsul Budiman Damanik	Kepala Desa
11	2016 s/d	Syaiful Amri	Kepala Desa

Sumber: Hasil Penelitian 2019

3.9.2 Kondisi Geografis

Desa Penggalian adalah salah satu Desa Dari 10 Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari IX (Sembilan) Dusun, terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 62 km diatas permukaan laut.

- a. Ke Ibu Kota Kecamatan (Desa Paya Pasir) \pm 15 Km.
- b. Ke Ibu Kota Kabupaten (Sei Rampah) \pm 35 Km.
- c. Ke Ibu Kota Provinsi (Medan) \pm 85 Km.

Desa Penggalian mempunyai batasan-batasan wilayah yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan perkebunan Bahilang dan Paya Pinang.
- b. Sebelah Timur: berbatasan dengan perkebunan Paya Pinang dan Desa Kuta Pinang.
- c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan perkebunan Sibulan.
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan perkebunan Bahilang dan Pabatu.

3.9.3 Demografi

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Desa Penggalan Tahun 2018

No	Dusun	Jumlah KK	L	P	L + P
1	Dusun I	171	344	276	620
2	Dusun II	140	274	265	539
3	Dusun III	88	151	150	301
4	Dusun IV	156	254	258	512
5	Dusun V	56	72	88	160
6	Dusun VI	143	263	226	489
7	Dusun VII	210	353	349	702
8	Dusun VIII	75	133	109	242
9	Dusun IX	96	124	133	257
Jumlah		1,135	1,968	1,854	3,822

Sumber: Hasil Penelitian 2019

3.9.4 Visi dan Misi

a. Visi

“Melayani masyarakat desa penggalan secara menyeluruh demi terwujudnya desa yang maju, mandiri dan sejahtera maju”

b. Misi

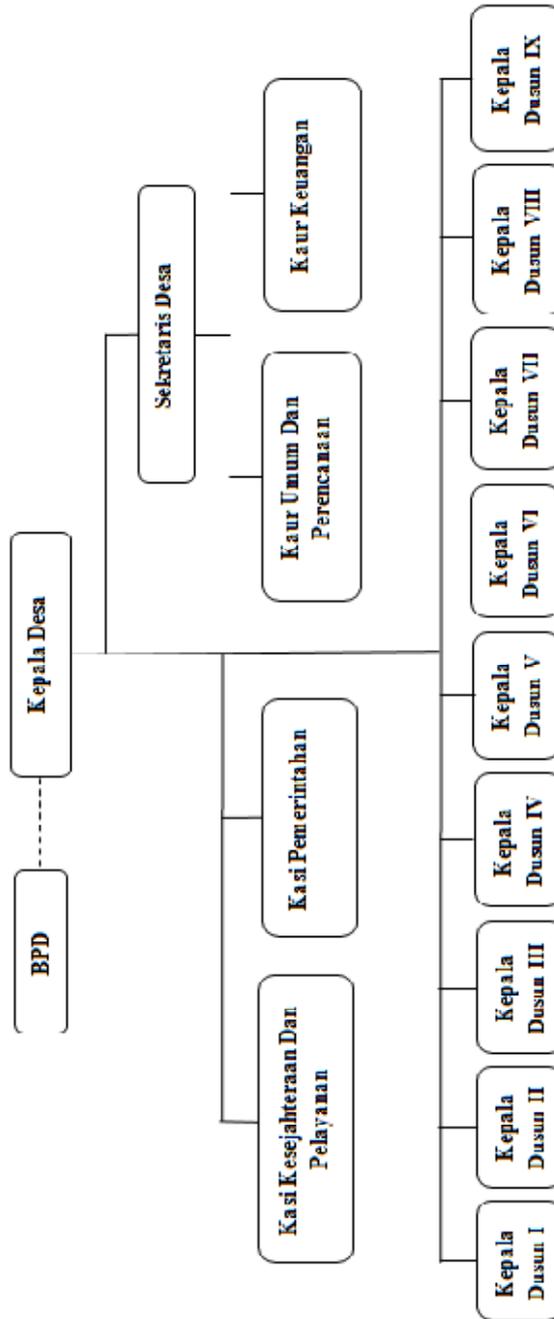
- 1) Mempermudah urusan surat menyurat terhadap masyarakat.
- 2) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, dan transparan dan dapat di pertanggungjawabkan.
- 3) Mengutamakan segala jenis bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu.

- 4) Berupaya mengajak masyarakat desa untuk aktif dalam organisasi-organisasi yang ada di desa seperti kelompok tani, pendidikan anak usia dini, kelompok pengajian, seni budaya, PKK, Karang Taruna.
- 5) Memberikan dukungan kepada masyarakat/pemuda/pemudi di bidang olahraga, kesenian, usaha tani, ternak dari dana APEBDES.
- 6) Penyaluran dana APEBDES tepat sasaran dan transparan ke masyarakat.
- 7) Memberikan kesempatan mengelola dana lunak pemerintah ke dusun yang belum pernah diberi kesempatan untuk mengelola.
- 8) Tanggap terhadap pengaduan masyarakat dan mengayomi masyarakat.
- 9) Siap menerima kritikan dan memberi keterangan tentang penyaluran dana desa.

3.9.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran wewenang dan tanggungjawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkup tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan memberikan kejelasan kepada setiap perangkat desa terkait dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme pertanggungjawabannya. Dengan adanya struktur pemerintahan ini sebagai pembagian tugas kepada semua perangkat desa yang akan saling berkoordinasi.

Gambar 3.2
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PENGALIAN



Sumber: Kantor Desa Pengalihan

3.9.6 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Kepala urusan umum dan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, kepala urusan umum dan perencanaan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa.
- 2) penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 4) menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Pengurusan administrasi keuangan Desa.
- 2) Pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa.

- 3) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Desa.
- 4) Melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa.
- 5) Melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa.
- 6) Melaksanakan administrasi penghasilan BPD.
- 7) Melaksanakan administrasi penghasilan lembaga pemerintahan desa lainnya.

e. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dibidang pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa.
- 2) Menyusun rancangan regulasi desa.
- 3) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan.
- 4) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- 5) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat.
- 6) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan.
- 7) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 8) Serta melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

f. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dibidang kesejahteraan dan pelayanan. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang kesejahteraan dan pelayanan. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 2) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 3) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
- 4) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

g. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dusun memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah serta mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 2) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 3) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3.9.7 Perangkat Desa Penggalian

Tabel 3.3
Perangkat Desa Peggalian

No	Jabatan	Nama Perangkat
1	Kepala Desa	Syaiful Amri
2	Sekretaris Desa	Syahman Harsela Damanik
3	Kaur Keuangan	Rendi Syahputra
4	Kasi Pemerintah	Siti Hajar Damanik
5	Kaur Umum dan Perencanaan	Crisstry Mada Damanik
6	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Wahyu Idayana
7	Kepala Dusun I	Gunawan
8	Kepala Dusun II	Tosar Damanik
9	Kepala Dusun III	Suparman
10	Kepala Dusun IV	Edi Iswanto
11	Kepala Dusun V	Agus Riadi
12	Kepala Dusun VI	Tugiran
13	Kepala Dusun VII	Misgianto
14	Kepala Dusun VIII	Sofyan
15	Kepala Dusun IX	Erwin

Sumber: Hasil Penelitian 2019

3.9.8 Sarana dan Prasarana Desa Penggalian

Tabel 3.4
Sarana dan Prasarana Desa Penggalian

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Masjid	8 unit
2	Musholla	8 unit
3	Gereja	2 unit
4	Paud Teratai	1 unit
5	TK	2 unit
6	SD Impres No 104322	1 unit
7	SD Impres No 106231	1 unit
8	SMP N 2 Tebing Syahbandar	1 unit
9	Madrasah Diniyah Awaliyah	2 unit
10	Pustu	1 unit
11	Polindes	1 unit
12	Posyandu	4 unit
13	Balai Desa	1 unit
14	Kantor Desa	1 unit
15	Tempat Pemakaman Umum	11 lokasi
16	KUD	1 unit

Sumber: Hasil Penelitian 2019

3.9.9 Program Pembangunan Infrastruktur

Tabel 3.5
Program Pembangunan Infrastruktur 2017-2018

No	Kegiatan	Dusun	Tahun	Keterangan
1	Plat Duekker	I	2017	2 unit
2	Drainase	II	2017	249 m
3	Rabat Beton	II	2017	179x2,5 m
4	Plat Duekker	II	2017	1 unit
5	Drainase	VI	2017	556 m
6	Rabat Beton	VI	2017	360x3 m
7	Plat Duekker	VI	2017	1 unit
8	Telford	VI	2017	680 m
9	Rabat Beton	III	2018	300 m
10	Rabat Beton	IV	2018	200 m
11	Telford	IV	2018	465 m
12	Drainase	V	2018	241 m
13	Drainase	VI	2018	357 m
14	Plat Duekker	VI	2018	2 unit
15	Telford	VIII	2018	485 m

Sumber: Hasil Penelitian 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Data yang diperoleh diawali dengan pengumpulan data dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab dan penulis melakukan wawancara dengan 6 orang narasumber penelitian yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, 1 orang Kepala Dusun dan 2 orang Tokoh Masyarakat.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

a. Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber berjenis kelamin laki-laki dan narasumber berjenis kelamin perempuan dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-Laki	5
2	Perempuan	1
Jumlah		6

Hasil penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.1 di atas mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang.

b. Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan

Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan dapat dibagi menjadi 3 yaitu SD, SMP, dan SMA. Masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Kondisi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1	SD	1
2	SMP	1
3	SMA	4
Jumlah		6

Hasil penelitian 2019

Berdasarkan tabel diatas mayoritas narasumber berdasarkan tingkat pendidikan adalah SMA dengan jumlah frekuensi 4 orang. Kemudian tingkat SMP 1 orang dan SD 1 orang.

c. Distribusi narasumber berdasarkan umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-40 tahun, umur 40-50 tahun, umur 50-60 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi
1	30-40 Tahun	1
2	40-50 Tahun	3
3	50-60 Tahun	2
Jumlah		6

Hasil Penelitian 2019

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya pengambilan keputusan bersama dalam pengambilan keputusan

Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran serta pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat, dan keputusan bersama merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dalam pengambilan keputusan harus mendasarkan beberapa nilai penting yang harus selalu ada dalam pengambilan keputusan agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syaiful Amri selaku Kepala Desa Penggalian pada 29 Januari 2019 pukul 11.00 wib, beliau mengatakan bahwa dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes) atau rapat yang lain beliau selalu berdiskusi dengan masyarakat atau pun perangkat desa. Keputusan yang diambil dalam rapat yaitu berdasarkan musyawarah, karena dengan musyawarah masalah dapat segera terselesaikan. Beliau sangat menghargai pendapat dari bawahan atau masyarakat karena dengan menghargai

pendapat dari siapa pun akan terciptanya hubungan yang lebih baik kemudian mempertimbangkan setiap saran atau ide yang diberikan masyarakat akan menambah wawasan dan bahan masukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahman Harsela Damanik selaku Sekretaris Desa Penggalian pada 29 januari 2019 pukul 14.00 wib, beliau mengatakan bahwa dalam rapat Kepala Desa ikut berdiskusi bersama masyarakat dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Kepala Desa menghargai pendapat yang diajukan masyarakat karena usulan semua dari masyarakat. Serta Kepala Desa mempertimbangkan saran atau ide yang diberikan bawahan atau pun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurjanni Syahfitri Saragih selaku ketua BPD Desa Penggalian pada 30 januari 2019 pukul 14.00 wib, beliau mengatakan bahwa benar Kepala Desa ikut berdiskusi bersama masyarakat dalam rapat musyawarah desa atau pun musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes). Dalam rapat tersebut keputusan diambil adalah keputusan yang berdasarkan musyawarah. Kepala Desa selalu menghargai pendapat yang diajukan masyarakat. Dan menurut beliau Kepala Desa juga mempertimbangkan saran atau pun ide dari masyarakat karena dengan begitu masyarakat akan sangat dihargai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gunawan selaku Kepala Dusun I Desa Penggalian pada 30 januari 2019 pukul 16.00 wib, beliau mengatakan bahwa Kepala Desa ikut berdiskusi dengan masyarakat saat rapat diselenggarakan, baik itu musyawarah desa dan musyawarah perencanaan

pembangunan desa (musrembangdes). Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan Kepala Desa sangat menghargai pendapat masyarakat. Menurutnya juga Kepala Desa itu mempertimbangkan saran atau ide yang diberikan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Robinson Harahap selaku tokoh masyarakat kelompok tani Desa Penggalan pada 31 Januari 2019 pukul 14.30 wib, beliau mengatakan bahwa Kepala Desa ikut berdiskusi dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah. Beliau menghargai segala pendapat dari masyarakat serta mempertimbangkan saran atau ide yang disampaikan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Sahri selaku tokoh agama di Desa Penggalan pada 31 Januari 2019 pukul 16.00 wib, beliau mengatakan bahwa dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes) Kepala Desa ikut berdiskusi. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah sesuai dengan kesepakatan bersama. Kepala Desa menghargai pendapat yang diajukan dari siapa pun bahkan beliau mempertimbangkan saran atau ide yang standart akan dirapatkan lagi.

b. Adanya pendelegasian wewenang kepada bawahan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan

Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang kepada bawahan. Pendelegasian wewenang merupakan proses yang bertahap dan yang menciptakan pembagian kerja, hubungan kerja, dan adanya

kerja sama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pendelegasian wewenang dapat memperluas ruang gerak dan waktu seorang pemimpin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syaiful Amri selaku Kepala Desa Penggalian pada 29 Januari 2019 pukul 11.00 wib, beliau mengatakan bahwa ketika membuat suatu kebijakan maka beliau akan meminta pendapat bawahan atau masyarakat dengan cara bermusyawarah. Beliau pernah memberikan wewenang kepada bawahan. Ketika masalah terjadi disalah satu dusun tetapi beliau tidak dapat hadir maka beliau memberikan wewenang kepada kepala dusun untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah tersebut. Menurut beliau bawahan atau pun masyarakat sudah menjalankan wewenang yang diberikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahman Harsela Damanik selaku Sekretaris Desa Penggalian pada 29 Januari 2019 pukul 14.00 wib, beliau mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan masyarakat tentu dilibatkan karena kebijakan itu pun akan berdampak kepada masyarakat maka Kepala Desa bermusyawarah dahulu dengan masyarakat tentang kebijakan apa yang akan dibuat. Menurut beliau Kepala Desa pernah memberikan pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kepala Desa memberikan wewenang seperti jika terjadi suatu masalah disalah satu dusun maka Kepala Desa memberikan wewenang kepada Kepala Dusun untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jika Kepala Dusun tidak sanggup maka bersama-sama menyelesaikan masalah. InshaAllah bawahan akan menjalankan wewenang yang diberikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurjanni Syahfitri Saragih selaku ketua BPD Desa Penggalian pada 30 januari 2019 pukul 14.00 wib, beliau mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan Kepala Desa melibatkan bawahan. Sepengetahuan beliau Kepala Desa pernah memberikan wewenang pernah Kepala Dusun seperti ketika terjadi suatu masalah dan kepala desa tidak ada di tempat maka Kepala Dusun diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk mengatasi masalah sesuai kemampuan. Sepengetahuan beliau Kepala Dusun tersebut telah menjalankan wewenang yang diberikan Kepala Desa dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gunawan selaku Kepala Dusun I Desa Penggalian pada 30 januari 2019 pukul 16.00 wib, beliau mengatakan bahwa Kepala Desa selalu melibatkan bawahan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Kepala Desa pernah memberikan wewenang kepada beliau sesuai dengan kemampuan beliau seperti menangani acara 17 Agustus dan InshaAllah beliau menjalankan wewenang tersebut dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Robinson Harahap selaku tokoh masyarakat kelompok tani Desa Penggalian pada 31 januari 2019 pukul 14.30 wib, beliau mengatakan bahwa Kepala Desa selalu melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Menurut beliau Kepala Desa belum pernah memberikan pendelegasian wewenang kepada kelompok tani dan beliau juga belum pernah diberikan wewenang. Beliau tidak mengetahui bagaimana Kepala Desa mendelegasikan wewenang tersebut dan apakah bawahan menjalankan wewenang yang diberikan dengan baik atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Sahri selaku tokoh agama di Desa Penggalian pada 31 Januari 2019 pukul 16.00 wib, menurut beliau kurang mengetahui apakah Kepala Desa pernah membuat kebijakan. Sedangkan tentang pemberian pendelegasian wewenang kepada bawahan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pernah diberikan kepada Kepala Dusun yang jika ada suatu perkara Kepala Dusun diharapkan mampu menyelesaikan perkara yang terjadi. Menurut beliau sudah melaksanakan dengan baik.

c. Adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Adanya peran aktif atau partisipasi dari masyarakat merupakan bentuk konsep pembangunan daerah dengan cara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat yang melibatkan nilai-nilai sosial. Dalam melaksanakan program pembangunan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, Kepala Desa tidak bekerja sendirian, melainkan bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syaiful Amri selaku Kepala Desa Penggalian pada 29 Januari 2019 pukul 11.00 wib, beliau mengatakan tentang program pembangunan di Desa Penggalian disusun di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan selama beliau menjadi kepala desa sudah banyak melakukan pembangunan dan pelaksanaan program pembangunan di Desa Penggalian berjalan dengan lancar. Beliau juga mengatakan

masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa atau pun musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes). Sarana dan prasana yang termasuk program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes). Dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Penggalian masih terbatasnya dana desa, untuk mengatasi terbatasnya dana desa maka dalam melaksanakan pembangunan desa pastinya harus secara bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahman Harsela Damanik selaku Sekretaris Desa Penggalian pada 29 januari 2019 pukul 14.00 wib, beliau mengatakan tentang program pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan selama Bapak Kepala Desa menjabat itu pembangunan drainase, telford, plat duekker, dan rabat beton. Pelaksanaan program pembangunan berjalan lancar. Masyarakat ikut andil dengan swakelola karena masyarakat juga yang ikut bekerja Menurut beliau sarana dan prasana Desa Penggalian masih kurang salah satu penyebabnya adalah dana desa, cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan pembangunan yang bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurjanni Syahfitri Saragih selaku ketua BPD Desa Penggalian pada 30 januari 2019 pukul 14.00 wib, menurut beliau mengenai program pembangunan yang telah dilakukan selama Bapak Syaiful menjabat itu berupa drainase, telford, plat duekker, rabat beton dan sudah berjalan lancar. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan itu adalah masyarakat dilibatkan dan ikut serta dalam musyawarah desa atau pun musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes). Kelengkapan

sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Penggalian itu sudah mulai tercukupi. Hambatan yang dialami dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Penggalian yaitu kurangnya dana desa. Cara untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pembangunan desa dilakukan harus secara bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gunawan selaku Kepala Dusun I Desa Penggalian pada 30 Januari 2019 pukul 16.00 wib, beliau mengatakan program pembangunan yang ada di Desa Penggalian sudah cukup banyak seperti pembangunan drainase disetiap dusun sudah dibangun walaupun belum seluruhnya. Pelaksanaan program pembangunan di Desa Penggalian sudah berjalan lancar. Menurut beliau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan itu masyarakat ikut serta dalam musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes). Sarana dan prasarana di desa sudah mulai memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hambatan yang dialami dalam melaksanakan program pembangunan contohnya akan dibangun leningan paret di sawah yang bermasalah dengan tanah masyarakat. Cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah aparat desa harus bernegosiasi dan berdiskusi terlebih dahulu kepada masyarakat agar kedepannya tidak terjadi masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Robinson Harahap selaku tokoh masyarakat kelompok tani Desa Penggalian pada 31 Januari 2019 pukul 14.30 wib, beliau mengatakan bahwa program pembangunan yang telah dilakukan adalah pembangunan telford, drainase, plat duekker, rabat beton.

Pelaksanaan program pembangunan di Desa berjalan lancar. Masyarakat dilibatkan di musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes) masyarakat diikutsertakan. Beliau jug mengatakan sarana dan prasana masih kurang dan belum merata karena kurangnya dana desa. Menurut beliau cara untuk mengatasi hambatan tersebut dana desa harus dibagi sesuai dengan banyaknya dusun, semua dusun mendapatkan anggaran dengan jumlah yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Sahri selaku tokoh agama di Desa Penggalian pada 31 januari 2019 pukul 16.00 wib, beliau mengatakan program pembangunan yang ada di Desa itu seperti pembangunan drainase, plat duekker, rabat beton, telford. Pelaksanaan program pembangunan di Desa Penggalian masih belum memadai. Menurut beliau masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pembangunan dengan dilibatkannya masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes). Sarana dan prasana di Desa Penggalian sudah membaik dari tahun ke tahun. Mengenai Hambatan yang dialami dalam melaksanakan program pembangunan di Desa adalah masih kurangnya dana desa. Menurut beliau kurangnya dana desa tersebut maka pembangunan pun harus dilakukan secara bertahap.

d. Adanya penilaian secara objektif kepada bawahan

Penilaian kinerja adalah upaya menilai prestasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas individu. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efesien.

Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Penilaian secara objektif adalah bahwa nilai yang diberikan benar-benar sesuai dengan tingkat pencapaian yang diukur dan berdasarkan pada data aktual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syaiful Amri selaku Kepala Desa Penggalan pada 29 Januari 2019 pukul 11.00 wib, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bawahan di Desa Penggalan sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing namun pasti pernah melakukan kesalahan. Beliau juga memberikan penilaian atas tugas dan tanggung jawab masing-masing bawahan. Cara beliau memberikan penilaian atas tugas dan tanggung jawab masing-masing bawahan yaitu beliau memperhatikan setiap bawahan, dengan melihat apakah tugas yang dilaksanakan selesai dengan baik dan tepat waktu. Mengenai apakah bawahan menerima penilaian dari beliau, bawahan tentu menerima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahman Harsela Damanik selaku Sekretaris Desa Penggalan pada 29 Januari 2019 pukul 14.00 wib, beliau mengatakan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bawahan di Desa Penggalan InshaAllah baik, beliau dan perangkat desa lainnya selalu berusaha melaksanakan tugas dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Kemudian Kepala Desa juga memberikan penilaian atas tugas dan tanggung jawab masing-masing bawahan. Cara Kepala Desa memberikan penilaian atas tugas dan tanggung jawab masing-masing bawahan dengan

memberikan penilaian seperti laporan yang telah dikerjakan atau tugas-tugas yang diberikan Kepala Desa. Aparatur Desa atau pegawai selalu menerima penilaian dari Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurjanni Syahfitri Saragih selaku ketua BPD Desa Penggalan pada 30 januari 2019 pukul 14.00 wib, Ibu Nurjanni mengatakan aparatur desa sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai jabatan. Kepala Desa pernah memberikan penilaian atas tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukan masyarakat atau perangkat desa dengan memperhatikan setiap tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan. Setiap masyarakat atau aparatur desa sudah tentu menerima penilaian dari Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gunawan selaku Kepala Dusun I Desa Penggalan pada 30 januari 2019 pukul 16.00 wib, menurut beliau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bawahan di Desa Penggalan sesuai dengan jabatan dan tanggungjawab. Kepala Desa pun memberikan penilaian atas tugas dan tanggung jawab tersebut. Menurut beliau Kepala Desa memberikan penilaian apabila pekerjaan diselesaikan dengan ketepatan waktu dan bawahan jelas menerima penilaian dari Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Robinson Harahap selaku tokoh masyarakat kelompok tani Desa Penggalan pada 31 januari 2019 pukul 14.30 wib, beliau mengatakan kurang mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing di Desa Penggalan. Beliau juga tidak

mengetahui apakah Kepala Desa memberikan penilaian kepada bawahan. Kemudian untuk bagaimana cara Kepala Desa memberikan penilaian atas tugas dan tanggung jawab juga beliau tidak mengetahui. Bahkan apakah bawahan menerima penilaian dari Kepala Desa juga beliau tidak mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Sahri selaku tokoh agama di Desa Penggalan pada 31 Januari 2019 pukul 16.00 wib, menurut beliau pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing bawahan di Desa Penggalan sudah sesuai tugasnya. Mengenai apakah Kepala Desa memberikan penilaian atas tugas dan tanggungjawab masing-masing bawahan beliau mengatakan kurang mengetahui. Kemudian bagaimana cara Kepala Desa memberikan penilaian atas tugas dan tanggungjawab masing-masing bawahan beliau pun mengatakannya kurang mengetahui. Untuk pertanyaan apakah bawahan menerima penilaian dari Kepala Desa, beliau mengatakan tentu pasti menerima jika Kepala Desa memberikan penilaian atas tugas dan pekerjaan yang perangkat desa lakukan.

e. Adanya *reward* atau *punishment* yang diberikan kepala desa kepada bawahan

Reward (penghargaan) adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh perorangan ataupun suatu lembaga. Pemberian penghargaan tersebut merupakan upaya dalam memberikan balas jasa atas hasil kerja pegawai, sehingga dapat mendorong pegawai bekerja lebih giat dan berpotensi. *Punishment* (sanksi) adalah hukuman diberikan dengan

maksud untuk memberikan perhatian kepada pegawainya agar bekerja secara aktif dan profesional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syaiful Amri selaku Kepala Desa Penggalian pada 29 januari 2019 pukul 11.00 wib, beliau mengatakan bahwa Kepala Desa pernah memberikan *reward* kepada bawahan. *Reward* yang diberikan dalam bentuk apa ucapan terima kasih dan tambahan gaji. Beliau juga mengatakan Kepala Desa pernah memberikan *punishment* kepada bawahan yang tidak disiplin atau tidak bertanggungjawab atas tugasnya. Kepala Desa memberikan *punishment* berupa surat teguran. Menurut beliau *Reward* dan *punishment* tentu mempengaruhi kualitas kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahman Harsela Damanik selaku Sekretaris Desa Penggalian pada 29 januari 2019 pukul 14.00 wib, beliau mengatakan Kepala Desa pernah memberikan *reward* kepada bawahan atas pelaksanaan yang telah dilakukan. *Reward* yang diberikan adalah tambahan gaji. Kepala Desa juga pernah memberikan *punishment* kepada bawahan yang tidak disiplin atau tidak bertanggungjawab. Kepala Desa memberikan *punishment* surat teguran. Menurut beliau *Reward* dan *punishment* tentu mempengaruhi kualitas kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurjanni Syahfitri Saragih selaku ketua BPD Desa Penggalian pada 30 januari 2019 pukul 14.00 wib, sepengetahuan beliau Kepala Desa pernah memberikan *reward* kepada pegawai dalam bentuk tambahan gaji. Menurut beliau Kepala Desa pernah memberikan *punishment* kepada masyarakat atau pegawai yang tidak disiplin atau tidak

bertanggungjawab atas tugasnya. Kepala Desa juga memberikan *punishment* berupa surat teguran. Beliau juga mengatakan *reward* dan *punishment* sangat mempengaruhi kualitas kerja bawahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gunawan selaku Kepala Dusun I Desa Penggalan pada 30 januari 2019 pukul 16.00 wib, beliau mengatakan tidak mengetahui apakah Kepala Desa pernah memberikan *reward* kepada bawahan atas pelaksanaan yang telah dilakukan. Untuk *Reward* yang diberikan pun tidak mengetahui sama sekali. Sedangkan untuk *punishment*, Kepala Desa pernah memberikan *punishment* kepada bawahan yang tidak disiplin atau tidak bertanggungjawab atas tugasnya itu berupa surat peringatan. *Reward* dan *punishment* tentu mempengaruhi kualitas kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Robinson Harahap selaku tokoh masyarakat kelompok tani Desa Penggalan pada 31 januari 2019 pukul 14.30 wib, beliau mengatakan bahwa Kepala Desa belum pernah memberikan penghargaan kepada kelompok tani, tetapi dinas pertanian pernah memberikan. Kepala Desa juga tidak pernah memberikan *punishment*. *Reward* dan *punishment* tentu mempengaruhi kualitas kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Sahri selaku tokoh agama di Desa Penggalan pada 31 januari 2019 pukul 16.00 wib, beliau mengatakan tidak mengetahui apakah Kepala Desa pernah memberikan *reward* kepada bawahan atas pelaksanaan yang telah dilakukan. Untuk *reward* juga tidak mengetahui yang diberikan dalam bentuk apa. Beliau juga mengatakan tidak

mengetahui apakah Kepala Desa pernah memberikan *punishment* kepada bawahan yang tidak disiplin atau tidak bertanggungjawab atas tugasnya. Untuk *punishment* kemungkinan akan diberikan surat teguran. Dan *reward* dan *punishment* pasti mempengaruhi kualitas kerja bawahan.

4.2 Pembahasan

a. Adanya pengambilan keputusan bersama dalam pengambilan keputusan

Menurut Danang dan Burhanudin (2015:94-95) melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan akan lebih meningkatkan kualitas keputusan dari pada dilakukan sendiri. Keputusan yang dibuat bersama dengan melibatkan partisipasi orang lain, membuat orang-orang yang terlibat dengan keputusan tersebut merasa bahwa itu adalah keputusan mereka.

Keputusan lahir dari suatu proses, dimana didalamnya terjadi diskusi yang intensif dan saling tukar pikiran. Pengambilan keputusan sangat penting dalam pengelolaan dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Peran pemimpin sangat besar dalam pengambilan keputusan dan mengambil tanggungjawab terhadap hasilnya. Keputusan harus dibuat oleh pemimpin agar anggota dapat melaksanakan berbagai kegiatan.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan di Desa Penggalian pada rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes) dilakukan secara partisipatif. Dimana keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Hal tersebut dapat dibuktikan dari salah satu hasil wawancara dengan bapak Ahmad Sahri selaku tokoh agama di Desa Penggalian

menyatakan bahwa Kepala Desa ikut berdiskusi bersama masyarakat di dalam rapat. Kepala Desa juga menghargai dan mempertimbangkan saran serta ide yang diberikan masyarakat.

- b. Adanya pendelegasian wewenang kepada bawahan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan

Raja Bambang (2007:24) mengemukakan dalam menyelesaikan tugas-tugas, karyawan diberi wewenang, hak, dan tanggung jawab secukupnya untuk menerapkan caranya sendiri yang dianggap efisien. Membagi kekuasaan ialah pembagian tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh atasan kepada bawahan, yang dimana pembagian tugas tersebut harus dilaksanakan secara adil dan sesuai kompetensi masing-masing bawahannya.

Kepala Desa memberikan kekuasaan kepada bawahan atau masyarakat sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya serta dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang telah didelegasikan. Pendelegasian wewenang oleh Kepala Desa kepada bawahan adalah perlu demi tercapainya efisiensi dari fungsi-fungsi dalam organisasi, karena tidak ada seorang atasan manapun yang dapat secara pribadi merampungkan secara penuh melaksanakan dan mengawasi semua tugas organisasi. Pendelegasian wewenang mempunyai pengaruh yang sangat besar didalam suatu organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang akan mengakibatkan tersendatnya kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut bila dikaitkan dengan wawancara dengan bapak Syaiful Amri selaku Kepala Desa Penggalan adanya pendelegasian wewenang kepada bawahan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan bahwa Kepala Desa memberikan pendelegasian wewenang kepada bawahan dan bawahan sudah menjalankan wewenang yang diberikan dengan baik.

c. Adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Toman (Davis dan Newstrom, 2015:50), kepemimpinan yang berusaha untuk melibatkan, mengikutsertakan, memberdayakan semua anggota organisasi di dalam mendukung peran dan tanggung jawab seorang pemimpin. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mendorong masyarakat untuk mandiri serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, prakarsa sendiri, dan memperbaiki hidup sendiri. Keterlibatannya dapat berupa aktivitas dalam wujud sumbangan pemikiran, pendapat, tindakan, ataupun sumbangan biaya untuk perbaikan lingkungan. Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam 5 tahap kegiatan yaitu kegiatan dalam pengambilan inisiatif, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pengelolaan dan pemeliharaan.

Partisipasi masyarakat adalah dimana masyarakat dimungkinkan menjadi aktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas

dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi.

Berdasarkan hal tersebut bila dikaitkan dengan adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bahwa masyarakat di berdayakan dengan diikutsertakan dalam rapat dan masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan desa. ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Syahman Harsela Damanik selaku Sekretaris Desa.

d. Adanya penilaian secara objektif kepada bawahan

Raja Bambang (2007:24) mengemukakan ciri-ciri kepemimpinan partisipatif yaitu menilai bawahan secara rasional, dengan melihat data dan fakta. Penilaian kepada pegawai merupakan upaya melakukan penilaian terhadap kinerja personil dengan melakukan penilaian secara objektif kepada bawahan, menilai harus dengan melihat data secara aktual, menilai perilaku pegawai baik perilaku positif dan negatif.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Syaiful Amri selaku Kepala Desa mengenai adanya penilaian secara objektif kepada bawahan bahwa Kepala Desa sudah memberikan penilaian kepada bawahan dengan melihat tugas-tugas yang sudah dilaksanakan oleh bawahan.

e. Adanya *reward* atau *punishment* yang diberikan kepala desa kepada bawahan.

Danang dan Burhanudin (2015:94-95), orang yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan merasa dihargai dan dihormati yang pada gilirannya akan

berpengaruh terhadap kepuasan kerja mereka. Penghargaan atau *reward* akan menimbulkan efek memberi motivasi dan semangat bagi para personil untuk bekerja lebih baik mendapatkan prestasi kerja yang lebih juga dapat meningkatkan kepercayaan diri bagi personil, karena salah satu fungsi dari reward memberikan tanda personil atau pegawai yang memiliki kemampuan lebih.

Sedangkan pemberian sanksi atau *punishment* juga hal yang wajar bila adanya kesalahan yang dilakukan bawahan dalam bekerja. Dalam ini sanksi yang diberikan oleh Kepala Desa ialah berupa sanksi teguran, bila kesalahannya berlanjut akan diberikan sanksi secara administrasi. Sanksi juga berkaitan dengan keberhasilan sesuatu, jika didalam lembaga atau instansi tidak diberlakukannya sanksi maka para pegawai di instansi tersebut akan bekerja dengan bersantai-santai atau hanya sesuai kehendak mereka saja yang akan membuat mereka sering melakukan kesalahan dan melanggar peraturan karena tidak takut sama sekali mendapatkan hukuman.

Berdasarkan hal tersebut bila dikaitkan dengan wawancara dengan bapak Syahman Harsela Damanik selaku sekretaris desa dengan adanya *reward* atau *punishment* yang diberikan Kepala Desa kepada bawahan ialah bahwa Kepala Desa memberikan penghargaan apabila bawahan tersebut melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan sanksi kepada bawahan apabila bawahan tersebut melanggar dari tugas dan tanggungjawab.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa Penggalan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Penggalan bahwa Kepala Desa sudah memiliki gaya kepemimpinan partisipatif. Kepala Desa juga selalu bermusyawarah dengan masyarakat terutama dalam hal pembangunan dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Pendelegasian wewenang yang diberikan Kepala Desa kepada bawahan atau masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing bawahan serta sesuai dengan kompetensi masing-masing bawahan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa Penggalan sudah melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam rapat musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes). Kepala Desa juga menilai bawahan secara objektif sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan. Kepala Desa memberikan *reward* kepada bawahan yang sudah melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan *punishment* kepada yang melanggar dari tugas dan tanggungjawab. Sarana dan prasarana di Desa Penggalan sudah mulai membaik tetapi masih ada sarana dan prasarana yang belum dilakukan pembangunan yang penyebabnya adalah kurangnya dana desa.

5.2 Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah Kepala Desa diharapkan untuk dapat mempertahankan gaya kepemimpinan partisipatif.

1. Masyarakat atau aparatur desa diharapkan lebih bertanggungjawab atas wewenang yang diberikan Kepala Desa.
2. Kepala Desa lebih meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat agar pembangunan di Desa Penggalan lebih meningkat.
3. Kepala Desa lebih memberikan penilaian secara objektif atas tugas dan tanggungjawab bawahan yang akan berdampak pada *reward* dan *punishment* yang diberikan Kepala Desa.
4. Lebih memaksimalkan pembangunan sarana dan prasarana terutama dalam pembangunan puskesmas dan penerangan lampu jalan disetiap Dusun di Desa Penggalan.
5. Diharapkan dalam pergantian Kepala Desa yang lama ke Kepala Desa yang baru terjalin komunikasi yang baik, sehingga nilai-nilai yang baik pada pemerintahan Kepala Desa yang lama dipertahankan dan nilai yang tidak baik dirubah demi memajukan pembangunan di Desa Penggalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Fahmi, Irham. 2018. *Pengantar Ilmu Kepemimpinan*. Depok: Rajawali Pers
- Kaswan. 2014. *Leadership and Teamworking*. Bandung: Alfabeta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rivai, Veithzal. dkk. 2014. *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- , dkk. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategis*. Bandung: PT Refika Aditama
- Siagian, Sondang P. 2010. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sunyoto, Danang. dkk. 2015. *Teori Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: CAPS
- Sutikno, Raja Bambang. 2007. *The Power of Empathy in Leadership*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Tambunan, Toman Sony. 2015. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo
- Wibowo. 2016. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yukl, Gary. 2017. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta Barat: Indeks

Kutipan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ely Wahyuni
Tempat/Tgl Lahir : Penggalian, 18 Oktober 1997
NPM : 1503100061
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun I Desa Penggalian, Kec. Tebing Syahbandar
Anak Ke : 7 (tujuh) dari 7 bersaudara

Data Orang Tua

Ayah : Alm. Herman
Ibu : Nuraidah
Alamat : Dusun I Desa Penggalian, Kec. Tebing Syahbandar

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 104322 Penggalian Tamat Tahun 2009
2. SMP Negeri 2 Tebing Syahbandar Tamat Tahun 2012
3. SMK Negeri 3 Tebing Tinggi Tamat Tahun 2015
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun

Penulis

Ely Wahyuni

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Penggalian Kecamatan Tebing Syahbandar Serdang Bedagai

- a. Adanya pengambilan keputusan bersama dalam pengambilan keputusan.
 - 1) Apakah dalam rapat kepala desa ikut berdiskusi bersama bawahan?
 - 2) Apakah pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah?
 - 3) Apakah kepala desa menghargai pendapat yang diajukan bawahan?
 - 4) Apakah kepala desa mempertimbangkan saran atau ide yang diberikan bawahan?
- b. Adanya pendelegasian wewenang kepada bawahan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
 - 1) Apakah kepala desa melibatkan bawahan dalam proses pelaksanaan kebijakan?
 - 2) Apakah kepala desa pernah memberikan pendelegasian wewenang kepada bawahan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan?
 - 3) Bagaimana kepala desa mendelegasikan wewenang tersebut?
 - 4) Apakah bawahan menjalankan wewenang yang diberikan dengan baik?
- c. Adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
 - 1) Apa saja program pembangunan yang ada di Desa Penggalian?
 - 2) Bagaimana pelaksanaan program pembangunan di Desa Penggalian?

- 3) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Penggalian?
 - 4) Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Penggalian?
 - 5) Hambatan apa yang dialami dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Penggalian?
 - 6) Bagaimana cara untuk mengatasi hambatan tersebut?
- d. Adanya penilaian secara objektif kepada bawahan
- 1) Bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bawahan di Desa Penggalian?
 - 2) Apakah kepala desa memberikan penilaian atas tugas dan tanggung jawab masing-masing bawahan?
 - 3) Bagaimana cara kepala desa memberikan penilaian atas tugas dan tanggung jawab masing-masing bawahan?
 - 4) Apakah bawahan menerima penilaian dari kepala desa?
- e. Adanya *reward* atau *punishment* yang diberikan kepala desa kepada bawahan.
- 1) Apakah kepala desa pernah memberikan *reward* kepada bawahan atas pelaksanaan yang telah dilakukan?
 - 2) *Reward* yang diberikan dalam bentuk apa?
 - 3) Apakah kepala desa pernah memberikan *punishment* kepada bawahan yang tidak disiplin atau tidak bertanggung jawab atas tugasnya?
 - 4) Bagaimana kepala desa memberikan *punishment*?
 - 5) Apakah *reward* dan *punishment* mempengaruhi kualitas kerja bawahan?